

DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.7/3453/2025
Tanggal Pembuatan : 12 Agustus 2025
Tanggal Revisi : Tanggal Efektif Agustus 2025
Disahkan Oleh

Kemenkes

Emmilya Rosa, SKM., MKM. NIP 197305251997032001

Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana:

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi dan Pengawasan Penyidik 3. Pegawai Negeri Sipil oleh Penyidik Polri
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan
- 11 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik

- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
- Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
- PPNS Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Keterkaitan SOP:

SOP Teknis Investigasi/Penyelidikan

- Peralatan/Perlengkapan:

 1 Alat-Alat Tulis Kantor
 - 2 Alat komunikasi
- 3 Akses Internet
- 4 Komputer/PC dan Printer
- 5 Instrumen Pemeriksaan
- 6 Kamera
- 7 Perekam suara

Peringatan:

- Apabila prosedur Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
- 2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Prosedur Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan

| Pros | Prosedur Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan | | | | | | | | | |
|------|--|------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|
| | | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | | | |
| No. | Aktivitas | Kepala Satuan Kerja | Ketua Tim Kerja | Penyidik Pegawai Negeri Sipil | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan | | |
| 1 | Memberikan arahan untuk melakukan tindak lanjut penindakan pelanggaraan karantina kesehatan. | | | | Hasil Analisa dugaan pelangaran karantina Kesehatan | | Hasil Analisa dugaan pelangaran karantina Kesehatan, Surat Tugas, dan Catatan Arahan | Keterkaitan SOP Penyusunan Surat Tugas | | |
| | Menugaskan untuk melakukan pemeriksaan pelanggaraan karantina Kesehatan | | | | Hasil Analisa dugaan pelangaran karantina Kesehatan, Surat Tugas, dan Catatan Arahan | 30 menit | Catatan penugasan | | | |
| 3 | Melakukan penylapan peralatan dan bahan pemeriksaan pelanggaran karantina kesehatan . | | | | Catatan penugasan | 300 menit | Alat dan bahan pemeriksaan pelanggaran karantina kesehatan | | | |
| 4 | Melakukaan Penyelidikan terhadap dugaan Perkara Pidana | | , | | Alat an dan bahan pemeriksaan pelanggaran karantina kesehatan | 3 hari | Hasil penyelidikan | keterkaitan SOP Teknis Investigasi/penyelidikan | | |
| 5 | Menyusun laporan hasil penyelidikan | | | | Hasil penyelidikan | | Draf Laporan Hasii penyelidikan | | | |
| 6 | Memeriksa laporan hasil penyelidikan | Y | | Т | Draf Laporan Hasil penyelidikan | | Draf Laporan Hasil penyelidikan | | | |
| 7 | Menyetujui laporan hasil penyelidikan dan mengarahkan untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan | \rightarrow \frac{1}{\gamma} | Т | | Draf Laporan Hasil penyelidikan | | Laporan Hasil penyelidikan dan catatan arahan | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | lo. Aktivitas | Pelaksana | | | Mutu Bak | | | |
|-----|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|-----------------|--|---|
| No. | | Kepala Satuan Kerja | Ketua Tim Kerja | Penyidik Pegawai Negeri Sipil | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| | | | | | | | | |
| 8 | Melaksanakan gelar perkara bersama dengan Koordinator Pengawas PPNS serta berkoordinasi dengan Setditjen Penanggulangan Penyakit | | | | Laporan Hasil penyelidikan dan catatan arahan | 300 menit | | Jika cukup bukti maka dilanjutkan ke proses Penyidikan Jika tidak cukup bukti maka proses dihentikan (proses pemberian sanksi administrasi dan/atau pembinaan) |
| 9 | Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) | | | | Laporan gelar perkara/telaahan kasus | 30 menit | Surat Perintah Penyidikan dan SPDP | SPDP diterbitkan oleh Kepala Satker atau atasan langsung PPNS dan diserahkan ke Kejaksaan Sprindik hanya untuk PPNS |
| 10 | Melaksanakan investigasi (pemanggilan dan pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka, pencarian alat bukti) dengan melibatkan Koordinator Pengawas PPNS | | | | Surat Perintah Penyidikan dan SPDP | 7 hari kerja | Hasil investigasi | dilakukan maksimal selama 7 hari kerja setelah terbit SPDP |
| 11 | Melaksanakan gelar perkara bersama dengan Koordinator Pengawas PPNS | | | | Hasil investigasi | 300 menit | Hasil gelar perkara | |
| 12 | Menyusun surat permohonan bantuan penahanan/penangkapan/upaya paksa dan penyitaan barang bukti | | | | Hasil gelar perkara | 30 menit | surat permohonan bantuan penangkapan/ penahanan/upaya paksa | |
| 13 | Melaksanakan penahanan/penangkapan/upaya paksa dan penyitaan barang bukti dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) | | | | surat permohonan bantuan penangkapan/ penahanan/upaya paksa | 20 hari | penangkapan/ penahanan/upaya paksa | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 14 | Menyusun berkas perkara | | | | penangkapan/ penahanan/upaya paksa | 5 hari | Berkas perkara | |
| 15 | Melaksanakan gelar perkara (final) bersama dengan Koordinator Pengawas PPNS | | | | berkas perkara | 300 menit | Laporan gelar perkara dan perbaikan berkas perkara | |

| | | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | |
|-----|--|------------------------|--------------------|----------------------------------|---|---------|---|---|
| No. | Aktivitas | Kepala Satuan Kerja | Ketua Tim Kerja | Penyidik Pegawai Negeri Sipil | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| 16 | Menyerahkan berkas perkara (sampal lengkap) dan tersangka ke Kejaksaan melalui Koordinator Pengawas PPNS | | | | Laporan gelar perkara dan perbalkan berkas perkara | | Laporan gelar perkara dan perbalkan berkas perkara dan catatan penyampalan (tanda terima) | Jika berkas kurang dapat dilengkapi dan diperbaiki |
| 17 | Menyampaikan dan mendokumentasikan laporan berkas perkara ke Setditjen Penanggulangan Penyakit | | | | Laporan gelar perkara dan perbaikan berkas perkara dan catatan penyampalan (tanda terima) | 5 menit | Arsip | |